

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara (DDTC News). Tax avoidance merupakan upaya untuk menghindari kewajiban membayar pajak yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengambil keuntungan sepihak agar pendapatan yang dimiliki tidak banyak terpotong pajak. Penghindaran pajak dapat dikategorikan pelanggaran pada Undang-Undang Perpajakan.

Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan Tax Justice Network yang berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 disebutkan dari angka tersebut, sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Suryo mengatakan, untuk meminimalisasi tax avoidance, pihaknya melakukan

pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. Kata Suryo, biasanya tax avoidance muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Suryo Utomo, 2020:24)(newssetup.kontan.co.id).

Penerimaan pajak pada semester I/2020 terkontraksi hingga 12%. Setoran dari seluruh sektor usaha utama tertekan. Kinerja fiskal paruh pertama 2020 tersebut menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (10/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2020 senilai Rp531,7 triliun, turun 12% dibandingkan kinerja periode yang sama tahun lalu senilai Rp604,3 triliun. Penerimaan dari seluruh sektor usaha utama masih terkontraksi. Penerimaan pajak dari industri pengolahan yang menyumbang 29,0% tercatat mengalami penurunan 12,8% pada semester I/2020. Selanjutnya, penerimaan dari sektor perdagangan yang menyumbang 19,7% tercatat terkontraksi 13,4%. Penurunan terdalam terjadi pada penerimaan sektor pertambangan, yaitu sebesar 35,8%. Adapun penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan *real estate*, transportasi dan pergudangan, serta jasa keuangan dan asuransi masing-masing tercatat turun 11,8%, 4,4%, serta 3,1% (DDTC News).

Reinaldo (2017) menyatakan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) adalah suatu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan baik perusahaan berskala besar ataupun kecil dalam rangka memperkecil, meminimalkan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan yang masih dalam lingkup ketentuan undang undang perpajakan yang berlaku atau tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku dan bersifat legal dengan menggunakan celah pada undang undang perpajakan yang berlaku. Tax Avoidance yang mempunyai sifat

legal sedangkan Tax Evasion mempunyai sifat ilegal. Maka itu untuk dapat menyimpulkannya yang menjadi pembeda antara keduanya adalah dalam sisi legalitasnya, sedangkan dari sisi lainnya keduanya tetap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penghindaran pajak ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh para wajib pajak saat SKP ( Surat Ketetapan Pajak ) belum dikeluarkan dan secara tidak langsung wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com)).

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak adalah profitabilitas. Perusahaan besar akan selalu menjadi perhatian sehingga manajer perusahaan akan bersikap patuh dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih mempertimbangkan resiko dalam mengelola pajaknya. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return on Assets (ROA) yang di prediksi akan mempengaruhi tax avoidance. Return on Assets merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013).

Selain profitabilitas, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance adalah leverage. Leverage merupakan tingkat penggunaan hutang untuk membiayai kegiatan perusahaan yang dapat berupa investasi, produksi, dan lain-lain. Semakin tinggi tingkat leverage maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang

dialami perusahaan. Upaya untuk mengurangi tingkat risiko, perusahaan melakukan berbagai cara untuk mencari keuntungan tambahan. Leverage merupakan jumlah aset yang dapat dibiayai dengan hutang sehingga akan menimbulkan resiko bagi kreditur. Habiba (2017) mengatakan bahwa ketika suatu perusahaan terlilit hutang, maka terdapat kewajiban untuk membayar kembali pokok dan bunga secara berkala. Hal ini membuat manajer perusahaan bekerja lebih keras untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

Kepemilikan Institusional diduga dapat memoderasi pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance. Kepemilikan institusional yang ada pada perusahaan akan memiliki peran penting di dalam pemantauan, disiplin dan mempengaruhi manajer. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010). Berdasarkan sudut pandang hubungan keagenan, akan terjadi kecenderungan bahwa manajemen akan mengelola perusahaan demi kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Penghindaran pajak (tax avoidance) memiliki unsur-unsur kerahasiaan yang mengurangi transparansi suatu perusahaan, oleh sebab itu sangat perlu untuk ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan adanya kepemilikan institusional (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Kepemilikan saham yang dimiliki institusi diharapkan dapat memberikan peran bagi institusi untuk mengawasi, memantau, mendisiplinkan perusahaan untuk tidak melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan.

Putu, et al (2018) melakukan penelitian berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. Hasil penelitian

menunjukkan profitabilitas, leverage dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan pada tax avoidance. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana & Amin(2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas dan leverage memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.

Handayani (2018) melakukan penelitian berjudul pengaruh Return On Assets (ROA), leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan perbankan yang listing di BEI periode tahun 2012-2015. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji regresi yang dilakukan membuktikan bahwa secara parsial variabel Leverage (LEV) tidak berpengaruh pada Tax Avoidance. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Semakin tinggi leverage maka semakin tinggi tax avoidance.

Penelitian terdahulu menyimpulkan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Maka dari itu penelitian ini mencoba menguji kembali dengan mengubah variabel dan objek sesuai saran peneliti sebelumnya serta mengganti periode waktu penelitian. Hal inilah yang melandasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri, Kimia dan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020”. Kepemilikan institusional digunakan sebagai variabel moderasi karena pemegang saham dapat mengawasi manajer dalam mengelola perusahaan.

**B. Rumusan Masalah :**

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap tax avoidance?
3. Apakah kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance?

**C. Tujuan Penelitian :**

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance.
2. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap tax avoidance.
3. Untuk menguji moderasi kepemilikan institusional dengan pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap tax avoidance.

**D. Manfaat Penelitian :**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan tax avoidance. Serta sebagai pengetahuan para analisi, investor maupun pemerintah dalam menilai sebuah perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan perusahaan sector industry, kimia dan pertambangan yang menjadi obyek penelitian dapat mengetahui pengaruh profitabilitas dan leverage pada tax avoidance.